

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Saat ini dengan waktu yang relatif singkat akuntansi sektor publik telah mengalami perkembangan yang pesat. Akuntansi sektor publik mendapat perhatian yang lebih besar terhadap praktik akuntansi yang dilakukan oleh lembaga pemerintah, Badan Umum Milik Negara atau Daerah, dan organisasi publik lainnya. Pada masa sebelumnya, yang kita ketahui bahwa badan usaha pemerintah yaitu Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah. Dengan perkembangan pengelolaan keuangan daerah saat ini, salah satu bentuk pengelolaan keuangan yang berkembang cukup pesat adalah organisasi Badan Layanan Umum (BLU).

Badan Layanan Umum merupakan organisasi sektor publik yang dioperasikan oleh pemerintah pusat maupun daerah yang fungsi utamanya ialah menjual barang dan/atau jasa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sebelum ditetapkan sebagai unit BLU, instansi tersebut dikenal dengan istilah satuan kerja (satker) yang menyelenggarakan tugas dan peran pemerintah dalam penyediaan pelayanan umum. Ditegaskan dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-21/PB/2015 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Badan Layanan Umum Bidang Layanan Pendidikan pasal 1 ayat (1) Badan layanan Umum, yang selanjutnya disebut dengan BLU, adalah salah satu instansi di lingkungan pemerintah pusat/pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau

jasa untuk dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

Pembentukan Badan Layanan Umum didasarkan pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara, yaitu bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat, sebuah satuan kerja (satker) dapat ditetapkan menjadi satuan kerja yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLU yang fleksibel dengan menonjolkan produktivitas, efisiensi, dan efektifitas. Untuk mewujudkan pengelolaan yang fleksibel maka dibentuk Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) yang merupakan konsep baru dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan Penetapan KMK Nomor 131/KMK.05/2009 Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLU Direktorat Jenderal Perbendaharaan mengemukakan bahwa Universitas Negeri Gorontalo adalah salah satu BLU yang berada di Kota Gorontalo yang disahkan pada tanggal 21 April 2009. Dengan ditetapkan Universitas Negeri Gorontalo sebagai satuan kerja pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) secara penuh, maka Universitas Negeri Gorontalo berkewajiban menyusun dokumen RBA pada tiap tahun anggaran sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum pasal 1 ayat (3) Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum yang selanjutnya

disingkat PPK-BLU adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah mengenai pengelolaan keuangan BLU, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan negara pada umumnya.

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-21/PB/2015 tentang Pedoman Penilaian Badan Layanan Umum Bidang Layanan Pendidikan pasal 1 ayat (3) Kinerja Satuan Kerja Badan Layanan Umum di bidang layanan pendidikan. Penilaian aspek keuangan adalah penilaian kinerja Badan Layanan Umum berdasarkan analisis data laporan keuangan dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum. PPK BLU ini lebih mengedepankan kinerja yang efektif, transparansi dan akuntabel.

Menurut Harahap (2020) Kinerja Keuangan merupakan gambaran kondisi keuangan perusahaan atau keuangan sebuah instansi yang dapat diukur dengan cara tertentu yang dapat berupa realisasi pendapatan dan belanja yang disusun berdasarkan basis akrual yang menghasilkan sebuah kesimpulan akan keberhasilan perusahaan atau instansi dalam mengelola keuangan.

Menurut Mardiasmo (2009) dalam jurnal Dona & Lestari (2020) Pengukuran kinerja keuangan sangat penting untuk menilai akuntabilitas pemerintah dalam melakukan kemampuan pengelolaan keuangan. Akuntabilitas

bukan sekedar kemampuan menunjukkan bagaimana uang publik dibelanjakan, akan tetapi meliputi kemampuan yang menunjukkan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan secara efektif, efisien, dan ekonomis. Efisien berarti penggunaan dana masyarakat tersebut menghasilkan output yang maksimal, efektif berarti penggunaan anggaran tersebut harus mencapai target-target atau tujuan untuk kepentingan publik, dan ekonomis berkaitan dengan pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu pada tingkat harga yang paling murah.

Menurut Ulum (2012) mengatakan bahwa pengukuran kinerja sektor publik dilakukan untuk memenuhi tiga maksud. Pertama, pengukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah. Ukuran kinerja dimaksudkan untuk dapat membantu pemerintah berfokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja sehingganya dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi sektor publik dalam hal pemberian pelayanan publik. Kedua, ukuran kinerja sektor publik digunakan untuk pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan. Ketiga, ukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki kelembagaan.

Berdasarkan data Laporan Realisasi Anggaran yang diperoleh dari Badan Layanan Umum Universitas Negeri Gorontalo dapat dilihat dari grafik 1.1.

Grafik 1.1



Sumber: Bidang Keuangan Universitas Negeri Gorontalo

Dari grafik 1.1. menunjukkan bahwa kinerja keuangan pada BLU Universitas Negeri Gorontalo menurut Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-21/ PB/2015 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Badan Layanan Umum Bidang Layanan Pendidikan pasal 8 ayat (3) termasuk dalam kategori baik dengan mendapatkan predikat AAA dengan presentase > 95%. Disamping itu, walaupun kinerja keuangan mendapat predikat baik, presentase kinerja keuangan tersebut masih mengalami fluktuasi. Dimana pada tahun 2017 ke 2018 mengalami peningkatan. Sedangkan dari tahun 2019-2020 mengalami penurunan. Dari presentase tersebut kinerja keuangan BLU Universitas Negeri Gorontalo dapat dikatakan efektif dan efisien, apabila kinerja keuangan BLU sudah sesuai dengan target serta tujuan BLU itu sendiri. Jika

dilihat dari presentase dari tahun 2017-2020 tersebut tingkat keefektifan kinerja keuangan dapat dikatakan efektif atau mencapai target atau tujuan yang diharapkan. Sedangkan efisiensi itu sendiri, dilihat dari presentase tahun 2017-2020 masih dapat dikatakan kurang efisien dikarenakan realisasi yang dikeluarkan lebih kecil dari jumlah anggaran yang diterima.

Beberapa penelitian sebelumnya tentang analisis kinerja keuangan Badan Layanan Umum yakni Syahromi & Cheisviyanny (2020) yang meneliti tentang Analisis Kinerja Keuangan Sebelum dan Sesudah Penerapan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Di Universitas Negeri Padang bahwa hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja Universitas Negeri Padang semakin baik paska penerapan PK BLU. Meski rasio keuangan masih belum stabil sehingganya kinerja keuangannya lebih dimaksimalkan.

Selanjutnya Maryana & Halim Nabilah (2020) meneliti tentang Pengaruh Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Terhadap Kinerja Finansial mengemukakan bahwa hasil pengujian diketahui bahwa terdapat pengaruh signifikan penerapan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum terhadap kinerja finansial sebesar 69,7%. Berdasarkan variabel kinerja finansial di Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi Kelautan dapat dikategorikan sedang dengan menggunakan value for money.

Selanjutnya penelitian dari Fretes de Christianry & Pattiruhu (2020) yang meneliti tentang Analisis Kinerja Keuangan RSSH GPM Ambon menunjukkan bahwa setiap rasio relative meningkat dari tahun 2015 hingga tahun 2017.

Berdasarkan latar belakang dengan fenomena yang telah dikemukakan, bahwa peneliti tertarik untuk meneliti suatu kajian ilmiah melalui penelitian dengan formulasi judul **“Analisis Kinerja Keuangan Pada Badan Layanan Umum Universitas Negeri Gorontalo.”**

1.2.Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan maka rumusan dalam penelitian ini adalah: Bagaimana Kinerja Keuangan BLU Universitas Negeri Gorontalo?

1.3.Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah maka tujuan penelitian adalah untuk mengetahui Kinerja Keuangan BLU Universitas Negeri Gorontalo.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat secara teoritis diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan yang luas pada bidang akuntansi sektor publik terkhususnya mengenai kinerja keuangan pada Badan Layanan Umum Universitas Negeri Gorontalo. Serta mampu di jadikan sebagai sumber penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Manfaat secara praktis diharapkan mampu memberikan bahan masukan dan gambaran bagi Badan Layanan Umum Universitas Negeri Gorontalo dalam menentukan kebijakan dan strategi untuk memperbaiki Kinerja Keuangan pada

Badan Layanan Umum sehingga kinerja keuangan tetap berjalan sesuai dengan semestinya.